



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DARLAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **624715**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 428 m2/360 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/240 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 1.040 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 9.578 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 7.862 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 6.215 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. Tanah Seluas 7.838 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **20.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI SKY DRAIEV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. **32.000.000**

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. **5.144.073**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	857.644.073
III. HUTANG	Rp.	21.300.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	836.344.073

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.